

Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Daur Ulang Sampah Di DKI Jakarta

Puji Hadiyanti

Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Corresponding Email: puji.hadiyanti74@gmail.com

Abstrak: Konsep pengentasan kemiskinan oleh pemerintah mengalami perubahan, yakni penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Konsep pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat digunakan karena diyakini sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan. DKI Jakarta memiliki berbagai permasalahan, diantaranya adalah masalah kemiskinan dan masalah sampah yang berdampak pada degradasi lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja baik secara personal, kelompok maupun masyarakat luas dan dari lembaga mana saja, termasuk Kelompok Daur Ulang Sampah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta?. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menemukan: Mekanisme dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok daur ulang sampah di DKI Jakarta. Penelitian ini sengaja dilakukan di kelompok daur ulang sampah berdasarkan kriteria tertentu, menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Sumber data diperoleh dari kelompok daur ulang sampah yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Analisis data melalui tahapan proses reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan. Selama proses analisis data peneliti juga melakukan verifikasi data. Temuan penelitian menunjukkan, bahwa (1), kelompok daur ulang sampah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terbukti efektif meskipun tidak melaksanakan tahap seleksi wilayah. (2), mekanisme pendekatan kelompok pada Pemberdayaan Masyarakat terintegrasi dengan ESD, meskipun indikator kurikulum pelatihan dan penelitian belum ada.

Kata kunci: mekanisme, pemberdayaan masyarakat, daur ulang sampah



©2017 –Pembelajar Universitas Negeri Makassar. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

1. PENDAHULUAN

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan di berbagai negara berkembang seperti di Asia dan Afrika mengalami transformasi baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Hal ini seiring adanya kegagalan-kegagalan yang terjadi pada implementasi program pengentasan kemiskinan, dimana kemiskinan masih saja menjadi persoalan bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia dinamika model pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi setiap individu maupun masyarakat luas mengalami perubahan dari masa ke masa sejalan dengan regulasi formal yang mengatur hal tersebut. Dimulai pada krisis

ekonomi yang terjadi tahun 1997, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan (MPMK) yang dicanangkan sejak tahun 1997. Intinya adalah menginstruksikan kepada semua instansi dan kelompok masyarakat yang terkait dengan penanganan kemiskinan supaya secara bersama-sama mengambil langkah-langkah kongkrit secara bersama-sama dan berkoordinasi di dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui instruksi ini, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di tata dan di susun kembali dalam suatu sistem yang lebih terpadu dan menyeluruh. Berbagai hambatan prosedur dan birokrasi yang selama ini dianggap dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dihilangkan.

Adanya pencanangan dan instruksi ini dilakukan dengan berbagai pendekatan dan memunculkan berbagai program di masyarakat, antara lain Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilaksanakan Kementerian Sosial. Untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kebijakan publik yang dianggap memberatkan kehidupan masyarakat miskin, maka pemerintah melalui pendekatan *Social Security Sistem*-Jaring Pengaman Sosial menggulirkan program seperti raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan kompensasi BBM.

Berbagai kebijakan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan pemerintah tersebut tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Belajar dari kondisi yang ada, maka konsep pengentasan kemiskinan oleh pemerintah mengalami perubahan. Perubahan konsep tersebut adalah konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan inipun belum mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Penyebabnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan kementerian yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral sehingga terdapat kesamaan program. Lebih jauh dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hanya terfokus pada bina fisik yaitu pembangunan infrastruktur dan sarana umum, selanjutnya PNPM yang ada dilanjutkan dengan istilah PNPM-Mandiri yaitu dengan penambahan adanya pemberian kredit kepada masyarakat miskin untuk usaha mikro. Pendekatan yang dilakukan dalam PNPM-Mandiri inipun hanya bersifat pada pemberian bantuan, belum kepada upaya pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan pemberdayaan ini secara nyata banyak dilakukan oleh pelaksana pembangunan dan masyarakat itu sendiri. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat, pemerintah dan LSM pada dasarnya adalah bentuk program pemberdayaan. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa program-program tersebut mempunyai bentuk, tujuan dan metode yang berlainan. Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada menemukan dan memahami secara mendalam mengenai upaya mengatasi masalah kemiskinan dan lingkungan (pengelolaan sampah) di DKI Jakarta melalui pemberdayaan masyarakat hingga mencapai tahap pemandirian masyarakat dengan menggunakan strategi atau pendekatan kelompok. Mengingat pendekatan kelompok merupakan salah satu metode yang cocok untuk diimplementasikan karena sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

konsep pemberdayaan sangat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tergantung pada konteks dan nilai budaya masyarakat setempat. World Bank menyatakan:

“The term empowerment has different meanings in different socio-culture and political contexts, and doesnot translate easily in to all languages”. While Wallerstein (1992) Empowerment is asocial-action process that promotes participation of people, organizations, and communities to wards the goals of increased individual and community control, political efficacy ,improved quality of community life,andsocialjustice.

Terpenting di sini adalah pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Hal ini dipertegas pula oleh Ife (1999:12) yang menyatakan bahwa pemberdayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian “*power*” atau kekuasaan atau kekuatan atau daya kepada kelompok yang lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berbuat.

Sejalan dengan itu *Cornell University Empowerment Group* dalam Saleebey (1992),

mengartikan pemberdayaan sebagai berikut: "... suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut".

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, maka kata kunci yang sering dipergunakan untuk memahami pengertian pemberdayaan adalah kata "berdaya", dalam hal ini pemberdayaan dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk "memberdayakan" orang lain. Tentunya memberdayakan seseorang adalah dalam rangka mewujudkan sumber daya yang berdaya dan mandiri.

Menurut Leagans pemberdayaan dalam proses pendidikan memiliki prinsip-prinsip:

- 1) Melakukan, artinya kegiatan pemberdayaan harus semaksimal mungkin melibatkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Melalui proses melakukan atau mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar baik dengan pikiran, perasaan dan ketrampilannya.
- 2) Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat sehingga peserta akan merasa senang mengikuti kegiatan pemberdayaan.
- 3) Asosiasi, artinya kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, karena akan menumbuhkan pengetahuan yang lainnya.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada keberlanjutan program, maka Word Bank menyarankan:

- 1) Perbaikan modal finansial, berupa perencanaan ekonomi-makro dan pengelolaan fiskal.
- 2) Perbaikan modal fisik berupa sarana dan prasarana.
- 3) Perbaikan modal berbagai sumber daya baik manusia maupun lingkungan sosial.
- 4) Pengembangan modal sosial yang menyangkut ketrampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan.

- 5) Pengelolaan sumber daya alam baik yang komersial maupun non komersial bagi perbaikan kehidupan manusia seperti air bersih, pengelolaan limbah dan stabilitas iklim.

Pemberdayaan masyarakat menurut Delivery (2004:67) dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti diuraikan di bawah ini. Setiap tahapan ini perlu disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang ada di wilayah pelaksanaan.

Tahap pertama yaitu seleksi lokasi/wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebaik mungkin karena pada masalah penanggulangan sampah di wilayah DKI Jakarta tidak semua elemen masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk tenaga, terkadang mereka hanya mampu berperan serta dengan dana dan pemikiran.

Pada tahap kedua yaitu sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Pada tahap ini keterlibatan semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan karena melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sasaran dan pihak terkait mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Disini akan terlihat minat atau ketertarikan dan sejauhmana keterlibatan masyarakat sasaran terhadap kegiatan penanggulangan masalah sampah di wilayah DKI Jakarta, sehingga dalam proses pelaksanaan sangat menentukan pula strategi atau pendekatan yang digunakan.

Tahap ketiga, yaitu proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini merupakan perwujudan dari tahap pertama dan kedua. Dalam tahap ketiga ini meliputi beberapa proses kegiatan yang harus di lalui dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Kajian keadaan wilayah sasaran.
- 2) Pembentukan kelompok,
- 3) Melaksanakan rencana kegiatan kelompok.
- 4) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Tahap terakhir adalah pemandirian masyarakat, pada tahap ini seorang *agen of change* sekaligus menjadi pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat yang pada awalnya memiliki peran aktif, berangsur-angsur mulai berkurang perannya bahkan semakin tiada. Peran pendamping akan dilanjutkan oleh pengurus kelompok, sedangkan waktu berakhirnya peran

pendamping disesuaikan dengan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan pada awal kegiatan.

Logic Model Sebagai Mekanisme Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemodelan adalah proses yang terdiri atas beberapa tahapan yang harus berlangsung dalam urutan. Selain itu diperlukan terwujudnya kondisi prasyarat, yaitu adanya unit dan organisasi sosial sukarela, dan identifikasi variabel perubahan. Kesulitan yang dihadapi masyarakat adalah aspek-aspek pemberdayaan, yaitu *power*, kognitif, psikologis, ekonomi dan politik. Karena kelimanya terkait dengan perilaku yang harus diubah, maka aspek-aspek tersebut dijadikan *short term outcomes*. Secara hipotetis, apabila terjadi perubahan perilaku (tahu, mau, mampu) dalam kelima aspek tersebut, serta ditunjang oleh *supply* dan infrastruktur, maka akan terjadi perubahan produktivitas (*medium term outcomes*), yang kemudian akan menimbulkan peningkatan *income* dan derajat kesejahteraan (*long term outcomes*).

Memperhatikan karakteristik masyarakat DKI Jakarta, strategi ini mempunyai peluang lebih besar untuk berhasil, apabila diterapkan di dalam kelompok. Artinya, hampir semua *output* – aktivitas sebaiknya berlangsung di dalam lingkungan fisik kelompok. Disebut hampir semua, karena kadang-kadang diperlukan aktivitas di luar lingkungan fisik kelompok. Hanya saja, itu baru berlangsung kalau benar-benar dituntut demikian, misalnya *benchmarking* dengan kelompok lain yang lebih maju. Banyak fakta dan pengalaman menunjukkan, aktivitas pemberdayaan yang berlangsung di luar lingkungan fisik kelompok, misal pemindahan tempat aktivitas, justru menjadi *blunder* yang mengakibatkan gagalnya pemberdayaan.

Hal lain yang penting diingat adalah proses pendidikan memerlukan waktu relatif lama untuk terlihat hasilnya secara terukur. Selain itu perlu diperhatikan pula kapasitas dan kecepatan belajar kelompok. Dengan d

Demikian, sebaiknya model ini diterapkan dengan pendekatan bertahap dalam kurun waktu tertentu. Aktivitas yang berlangsung dipilih berdasarkan kriteria penting, mudah dan tahapan. Berikut ini gambaran mekanisme pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan *logic model*.

Input	Proces- output		Outcomes		
	Activ- ities	Parti- cipa- nts	Short Term	Mid Term	Long Term
•Org. Sukarela	-Demo- ntrasi	•Kelo- mpok	•Meningka- t	•Usaha ekonomi	• elompok sejahtera
•Anggota dan karakteristiknya	-Praktik	Daur Ulang	n produks daur ulang	produkti f	• I ncome raising
•Dana	-Advo- kasi	Sampah	•Menguasa- i alat dan teknologi	•Praktek usaha sustaina- bility	• ebutuhan terpenuhi
•Bahan	-Suppl- ay	•Pemd	•Swast a/indu- stri	•Koperasi	• A kses
•Hasil Penelitian		•Toko	•Meningka- t		kses terhadap infrastruk- tur dasar:
•Kurikulum		Formal	h pengetahu- an		pendidika- n, pasar, kesehatan
•Unit Aksi Sosial		•Toko	•Meningka- t		• L ingkunga n lestari
		Infor- mal	pengetahu- an dan ketrampila- n pelestarian lingkungan		

Sumber: Analisis *Logic Model* dari Mekanisme Pendekatan Kelompok Daur Ulang Sampah

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap kelompok daur ulang sampah. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Sumber data diperoleh dari kelompok daur ulang sampah yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Analisis data melalui tahapan proses reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan. Selama proses analisis data peneliti juga melakukan verifikasi data.

3. PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok daur ulang sampah berdasarkan hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi seperti yang telah diuraikan, dapat dikatakan jelas terlihat adanya proses pengelolaan pembangunan oleh masyarakat sendiri dan tindakan bersama untuk peningkatan kehidupan bersama yang merupakan suatu kegiatan rutinitas dan diakui keberadaannya. Selain itu, dirasakan manfaatnya dan ditempatkan sebagai bagian dari pola tindakan bersama, dengan kata lain mekanisme

pengelolaan pembangunan oleh masyarakat tersebut sudah terinstitusionalisasi. Oleh karena sudah menjadi bagian dari pranata sosial, maka proses dan mekanisme tersebut akan tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat, terlepas ada atau tidak ada stimulus dari eksternal. Kondisi tersebut menghilangkan ketergantungan kepada pihak lain dan menumbuhkan keberlanjutan pembangunan.

Apa yang terjadi pada kelompok daur ulang sampah merupakan proses belajar. Proses belajar disamping menghasilkan pengetahuan dan pemahaman akan masalah sampah dan pengelolaannya berdasarkan pada kondisi sosial (nilai dan norma masyarakat setempat-kearifan lokal) juga menghasilkan mekanisme pembangunan yang melembaga. Perpaduan antara semua unsur yang ada ditambah dengan adanya modal sosial dapat menjadi energi penggerak tindakan bersama, sehingga masyarakat dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Mekanisme inilah yang menggerakkan siklus kemandirian dalam masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat yakni *Help the people to help themselves* terutama pada tingkat komunitas lokal. Melalui siklus ini akan berlangsung dinamika dari aktivitas lokal satu ke aktivitas lokal berikutnya yang secara paralel menggambarkan peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus peningkatan kondisi kesejahteraan.

Hal ini terlihat pada aktivitas yang terjadi pada kelompok daur ulang sampah yakni dimulai dari aktivitas mengumpulkan sampah, memilah-milah sampah, melakukan pencacahan, membuat pupuk kompos hingga melakukan pembuatan souvenir (tas, dompet dan payung) dengan bahan dasar sampah kering (non organik) serta pembudidayaan ikan lele sebagai bentuk aktivitas yang berkembang. Untuk melihat hasilnya secara nyata dalam arti dapat menambah penghasilan keluarga maka, kelompok juga membentuk koperasi kelompok dengan manajemen seperti bank sehingga koperasi tersebut bernama bank sampah. Kondisi ini memungkinkan setiap anggota kelompok memiliki potensi untuk berkembang atas kemampuan sendiri dan memiliki keswadayaan.

Di dalam setiap kehidupan masyarakat terkandung potensi dan sumberdaya untuk meningkatkan kondisi kehidupannya. Lebih dari itu, dalam kehidupan masyarakat juga terbentuk suatu sistem dengan berbagai komponen

pendukungnya. Sistem ini terbentuk dan menjadi mapan melalui dinamika kehidupan yang panjang sehingga sudah lebih dulu teruji. Melalui sistem ini pula proses, mekanisme dan relasi sosial berlangsung seperti yang terdapat pada kelompok daur ulang sampah. Disini jelas terlihat peningkatan kapasitas masyarakat dibangun atas dasar kekuatan sendiri.

Masyarakat bukan saja mempunyai potensi untuk berkembang, melainkan juga memiliki sistem dan mekanisme dalam mengembangkan dirinya. Sistem tersebut dibangun dan selalu disempurnakan melalui proses interaksi (proses belajar) dengan lingkungannya baik internal maupun lingkungan eksternal, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Sistem yang berkembang melalui proses belajar sosial tersebut lebih mempunyai kemampuan secara mandiri. Lebih dari itu, masyarakat secara mandiri juga mampu menyempurnakan proses dan mekanisme serta mampu memecahkan masalah sosial secara melekat melalui kemampuan mengolah umpan balik. Melalui proses belajar tersebut, masyarakat mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya secara kumulatif dengan proses *learning by doing* dan melalui proses belajar sepanjang hayat-*lifelong learning*.

Dalam perspektif Pendidikan Nonformal tentu saja hal ini merupakan perwujudan dari cita-cita atau tujuan yang dicapai yakni membangun masyarakat gemar belajar atau masyarakat pembelajar dengan prinsip belajar abad 21 menurut Unesco, yakni berdasarkan pada 4 pilar: 1) *learning to think*-belajar berpikir, 2) *learning to do*-belajar berbuat, 3) *learning to be*-belajar untuk tetap hidup, dan 4) *learning to live together*-belajar hidup bersama antar bangsa. Oleh karena itu, budaya belajar harus dijadikan kebutuhan hidup dan budaya bangsa.

4. KESIMPULAN

Mekanisme dalam pelaksanaan pemberdayaan pada setiap tahapannya telah sesuai dengan tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang semestinya dilakukan sehingga dapat dikatakan terintegrasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dimana anggota kelompok selain pada kegiatan koperasi kelompok dengan nama bank sampah, juga mengikuti kegiatan mengolah sampah seperti membuat kompos dan souvenir walaupun tidak semua anggota terlibat.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Amri Jahi. (2006). *Aksi Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*. Institut Pertanian Bogor.
- Aprilia Theresia dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Bunakor. (2006). *Transformasi Pertanian Tradisional Menuju Pertanian Industri Menghadapi Pasar Bebas*. Makalah. Disampaikan dalam Temu Pakar “Penyusunan Konsep Pertanian Berbudaya Industri” di IPB Bogor.
- Carthwigh Darwin San. (1968). *Group Dynamic Research and Theory*. Second Edition. Michigan: Roe, Peterson and Company.
- Chambers. (1983) *Diffusion of Innovations*, Third Edition, New York: The Press.
- Dahana. OP and OP. Bhatnagar. (1980). *Education and Communication for Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing CO.
- Delivery. (2004). *Community Development*. Jakarta: LP3ES.
- Dharmawan, (2008). *Gerakan Sosial dan Dinamika Masyarakat Pedesaan*. Intitut Pertanian Bogor.
- Djam’an Satori (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Edi Suharto. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Freire, Paulo. (1972). *Pedagogy of The Oppressed*. London: Penguin.
- Gerungan. (1981). *Psikologi Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Gibson. (1984). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi Ke Empat Jakarta: Erlangga
- Heider, Fritz, (1956). *The Psychology Of Interpersonal Relations* New York: John Mileey and Sons Inc .
- Hendropuspito. (1989). *Dinamika Kelompok*. Bandung : Alfabeta
- Homans, G.C. 1953. *The Human Group, Brace and Word*. New York: Horcourt.
- Hikmat Hari. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora